

IMPLEMENTASI KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DI BIDANG PENYELUNDUPAN ORANG

Oleh:

Ririn Wahyuningtyas¹

(Ririn_wnt@yahoo.com)

Pembimbing : Irwan Iskandar , S.IP, MA,

Bibliografi : 3 Jurnal, 13 Buku ,28 internet.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study describes the implementation of cooperation between Indonesia with Australia in the field of rule of law in the matter of people smuggling. Law enforcement cooperation agreements exist on Lombok on November 13, 2006. Indonesia as a transit Country people smuggling to Australia destinations. Based on the terms of Indonesia and Australia are facing the same threats, namely in the form of people smuggling crimes.

The authors obtained data from journals, official documents, theses, books, the internet to analyze the implementation of law enforcement cooperation in the field of smuggling people between Indonesia with Australia. Theoretical framework the author use in research this is the realist perspective, theory of transnational crime from Monica Massari and Gustavo Cano, and the theory of cooperation from K. j. Holsti.

Implementation of law enforcement cooperation in the field of people smuggling between Indonesia with Australia that is through dialogue, consultation and cooperation in capacity building of law enforcement, operating together in intensifying cooperation between police forces, cooperation between the institutions of Indonesia and Australia.

Keywords: Treaty of Lombok, Indonesia, Australia, people smuggling, law enforcement

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2012

Pendahuluan

Kerjasama internasional terkait penegakan hukum menjelaskan dua variabel pembahasan yaitu mengenai penegakan hukum dan kerjasama internasional, yang diartikan sebagai sebuah penegakan hukum tidak akan efektif tanpa adanya suatu kerjasama internasional.² Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia telah dimulai tahun 1949, dimana Negara Australia merupakan salah satu dari Negara yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Hubungan bilateral kedua Negara berlanjut ditandai dengan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer yang memberikan surat berisikan prioritas utama Australia dalam perjanjian keamanan bilateral Indonesia – Australia pada juli 2005 kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda. Hasil dari pembahasan tersebut menyepakati sebuah Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang kerjasama keamanan (*Agreement Between the Government of the Republic Indonesia dan the Government of Australia on Framework for Security Cooperation*) pada Agustus 2006 di Jakarta dan September 2006 di Canberra. Perjanjian ini telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan wirajuda pada 13 November 2006 di Lombok.³

² Mahmud syaltout. *Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*. Jakarta: Pengayoman, 2012. Hal.5

³ Istiqamah Purnomo. *Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia-Indonesia studi kasus: Lombok Treaty*. Diakses dari

Dari 9 ruang lingkup kejahatan transnasional yang menjadi pembahasan dari Perjanjian Lombok khususnya dalam penegakan hukum, peneliti hanya terfokus pada 1 masalah kejahatan yaitu penyelundupan orang.

Masalah penyelundupan orang merupakan masalah krusial dimana masalah penyelundupan orang merupakan sebuah kejahatan yang harus mendapatkan perhatian, tidak hanya perhatian masyarakat regional, namun masyarakat internasional. Penyelundupan orang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh satu negara, melainkan harus diselesaikan dengan melibatkan banyak negara, melalui berbagai koordinasi, komunikasi, negosiasi, dan regulasi bersama. Penanganan penyelundupan orang secara bersama-sama sangat tepat mengingat alur kejahatan ini melibatkan banyak negara yang dilewatinya.⁴

Penyelundupan orang dalam konteks Negara Indonesia dengan Australia yang faktanya Negara Indonesia hanya sebagai Negara transit oleh para penyelundupan orang sementara tujuan sebenarnya adalah negara Australia. Sebagai Negara tujuan penyelundupan orang, Australia belum mempunyai kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan ini sehingga menjadi pendorong lajunya penyelundupan orang ke Australia melalui Indonesia.⁵

https://www.academia.edu/12215886/kerjasama_pertahanan_dan_keamanan_australia_indonesia_studi_kasus_lombok. Pada tanggal 11 Januari 2016

⁴ Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta. *Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia*. Jurnal Pertahanan Vol.3.No.3. Bandung: UNJANI, 2013. Hal.155

⁵ Humphrey Wangke. *Indonesia dan Masalah Imigran Gelap*. Info Singkat Hubungan

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif realis, teori kejahatan transnasional, kerjasama internasional. Prespektif realis melihat Negara sebagai aktor dominan yang terdapat adanya kekuasaan dan pihak yang menguasai untuk melakukan dominasi. Ciri sebuah Negara modern yaitu Negara mempunyai wilayah yang jelas, sebuah pemerintahan yang di beri otoritas kedaulatan serta pelaksanaan kekuasaan terhadap rakyat.⁶

Negara berdaulat merupakan aktor rasional mandiri yang sangat *concern* dengan keuntungan relatif karena mereka harus berfungsi dalam sebuah lingkungan anarkis di mana keamanan dan keadaan Negara sangat bergantung pada kemampuan Negara itu sendiri dalam memobilisasi sumber daya mereka melawan ancaman-ancaman luar.⁷

Kaum realis mengakui adanya kerjasama dan institusi-institusi internasional yang memfasilitasi kerjasama tersebut. Kaum realis mengakui pentingnya Negara dalam politik dunia, serta mempercayai bahwa Negara-negara bergabung dalam institusi-institusi dunia serta melakukan kerjasama jika sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing Negara.⁸

Teori kejahatan transnasional menurut pendapat Monica Massari yaitu: Kajian hubungan internasional menggunakan istilah transnasional untuk mengacu pada pergerakan informasi, uang, obyek-obyek fisik, orang, dan barang nyata atau tidak nyata yang melewati perbatasan Negara. Melalui perspektif ini dapat dilihat bahwa sebuah organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatannya menggunakan pelaku internasional seperti korporasi dan multi kebangsaan yang bertujuan memaksimalkan kebebasan dalam bertindak serta meminimalisasi dampak khususnya dari pihak pengawasan nasional atau internasional. Menyangkut hal tersebut kejahatan ini memiliki strategi yang tujuannya menciptakan kesempatan peluang untuk pasar yang baru.⁹

Sedangkan teori kejahatan transnasional yang disampaikan oleh Gustavo cano membahas transnasionalisme yang mencakup bagian yaitu ekonomi, politik, sejarah, geografi, antropologi. Cakupan yang luas dari istilah transnasionalisme menghasilkan kekurangan namun Gustavo Cano menyatakan sebuah kesamaan pendapat yang dibagi dalam 2 bagian yaitu : *Pertama*, mengenai migrasi internasional dengan unit analisa yang menyatakan tentang dualitas nyata yang relatif, yang berhubungan dengan dualitas individu dan dualitas hubungan antar organisasi yang menangani isu-isu imigran dengan Negara pengirim dengan Negara tujuan. *Kedua*, bahwa

Internasional Vol7.IV.No.17. Hal 1-3. Diakses dari

<http://pdfresources.org/pdf/150512112800.pdf>.

Pada Tanggal 15 Januari 2016.

⁶ Jill Steans dan Lloyd pettiford. *Hubungan internasional: Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 59-62

⁷ Martin Griffiths. *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. Hal. 42

⁸ *Op.cit.* Hal. 73

⁹ Monica Massari. *Transnational Organized Crime between Myth and Reality: the Italian Case*. 2001. Hal. 22. Diakses dari www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/grenoble/ws8/massari.pdf Pada tanggal 11 Januari 2016.

transnasionalisme dianggap sebagai suatu proses atau rangkaian proses dalam setiap disiplin atau bidang penelitian yang membangun istilah tersebut. Hal yang terkandung didalamnya bahwa unsur-unsur yang ada dapat dikaji sebagai variabel yang dijelaskan atau yang menjelaskan, tergantung pada kerangka teoritis dan metodologi yang dipilih.¹⁰

Teori kedua dalam penelitian ini yaitu kerjasama Internasional yang disampaikan oleh K.J Holsti:

*“ Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama ”*¹¹

I. Isi Pengertian Penyelundupan Orang

Penyelundupan orang merupakan kejahatan yang bertujuan untuk menjadi imigran gelap, sehingga penyebab munculnya kasus imigran gelap dapat menjadi penyebab munculnya tindakan penyelundupan orang. Penyelundupan orang dapat diartikan sebagai fasilitas, transportasi, dan usaha

mengantar masuknya seseorang yang melewati batas internasional, melanggar satu atau lebih Negara hukum, secara sembunyi-sembunyi atau melalui penipuan dengan menggunakan dokumen palsu.

Pelaku dan Modus Operandi dalam Penyelundupan orang

Pelaku dan modus operandi kasus penyelundupan orang berkaitan erat dengan pembayaran yang diterima dari korban penyelundup. Pembagian tugas modus operandi penyelundupan orang yaitu:

- 1) *Para calo* bertugas sebagai pengatur rute dan mengatur jangka waktu perjalanan serta fasilitas imigran gelap.
- 2) *Perencana perjalanan* adalah seorang yang telah diakui profesionalitasnya dalam jaringan penyelundupan
- 3) *Sopir* yang bertugas mengantar korban penyelundupan ke darat.
- 4) *Nelayan tradisional* merupakan operator lapangan yang bekerja lintas pulau, lautan, dan Negara.
- 5) *Aparat Negara* yang berasal dari Negara transit dan tujuan yang lemah serta dapat diajak “bekerjasama” dalam hal korupsi dan kolusi¹²

Ancaman Penyelundupan Orang di Indonesia

¹⁰ Gustavo Cano. “On Transnationalism” yang merupakan bagian dari Mexico-North Research Network Transnationalism Research Project. Hal 1-8. Diakses dari www.mexnor.org/programs/TRP/exnor%20On%20Trans%20-%20Suggested%20Cit.pdf.

Pada tanggal 11 Januari 2016

¹¹ K.J . Holsti. *Politik Internasional ; Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta: Erlangga, 1998. Hal. 209

¹² Partogi Nainggolan. *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2009. Hal.161

Masalah penyelundupan orang merupakan dampak dari bentuk lalu lintas yang ramai di Indonesia terkait barang, jasa dan kedatangan manusia. Posisi strategis Indonesia menyebabkan dampak positif berupa pemanfaatan untuk perkembangan perekonomian, namun di lain pihak pada bidang kejahatan pasar bisnis penyelundupan orang Indonesia dianggap paling menguntungkan.

Ancaman penyelundupan orang di Australia

Australia merupakan sebuah negara dengan kondisi perekonomian yang cukup baik di kawasan Asia Pasifik sehingga warga negara Australia dapat dikatakan sejahtera. Selain itu kondisi Politik dan keamanan di Australia cenderung lebih stabil dari negara di kawasan Asia Pasifik lainnya. Ancaman penyelundupan orang di Australia bermula dari penghapusan *White Australia policy* oleh pemerintah Australia yang berdampak pada kebebasan orang-orang asing untuk tinggal dan menetap di Australia dengan asumsi memberikan efek positif yaitu menjadi kekuatan untuk membangun Australia.

Faktor Eksternal Indonesia Melakukan Kerjasama dengan Australia

1. Adanya Struktur Sistem Keamanan Internasional

Posisi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) menjadi posisi struktur keamanan Indonesia, dimana struktur ini menuntut isu seperti penyelundupan orang dijadikan isu kepentingan dalam negeri.

2. Terdapat Permasalahan Global dan Regional

Permasalahan global juga merupakan masalah regional hal ini disebabkan adanya globalisasi, dimana isu seperti penyelundupan orang yang menjadi permasalahan global juga merupakan masalah regional Indonesia.

3. Pengaruh Karakteristik Struktur Ekonomi Internasional

Karakteristik ekonomi Internasional dapat dilihat dari ketergantungan ekonomi, dimana Indonesia merupakan Negara yang masih menerima bantuan dari segi ekonomi dari Bank Dunia untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.¹³

4. Adanya kebijakan dan Tindakan Aktor Lain

Kebijakan Australia yang sering dipengaruhi aktor lain yaitu Amerika Serikat, telah mempengaruhi nilai umum masyarakat internasional. Indonesia sebagai Negara tetangga Australia.

5. Penerapan hukum Internasional dan Opini Publik

Kelemahan dalam penerapan hukum internasional terkait sifat koordinatif, dan kurangnya adanya institusi penegak hukum. Selain fakta tersebut Indonesia sebagai masyarakat internasional perlu mempertimbangkan sebuah opini publik yang ada yaitu perlu nya sebuah Negara menggunakan hukum internasional dimana kerjasama penegakan hukum dengan Australia merupakan salah satu bentuk *agreement* yang dilakukan secara bilateral yaitu antara Negara Indonesia dengan Australia.¹⁴

¹³ Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/22587/3/bab%201.pdf>. Pada tanggal 4 April 2016

¹⁴ Sanchi Davis. *Australia Memperkuat Hubungan Penegakan Hukum dengan Indonesia*. Diakses di http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMHAJM11_001.html. Pada tanggal 5 April 2016

Faktor Internal Indonesia Melakukan Kerjasama dengan Australia

1. Kebutuhan ekonomi, sosial, dan Keamanan

Indonesia merupakan Negara yang membutuhkan Australia dalam segi ekonomi yaitu: nilai realisasi investasi Australia ke Indonesia dari tahun 2006 terdapat proyek dan jumlah Investasi 8,633 dan bertambah pada tahun 2015 menjadi 293 proyek dan jumlah investasi 104,611,1.¹⁵ Sedangkan dari segi sosial Indonesia merupakan Negara tujuan wisatawan mancanegara dimana kunjungan wisatawan asal Australia ke Indonesia relatif banyak dengan jumlah 346.245 pada tahun 2002.¹⁶ Jumlah wisatawan asal Australia ke Indonesia tahun 2015 mencapai 878.920.¹⁷ Sementara dari segi politik Indonesia yang lemah nilai kepercayaan dari masyarakat sebesar 20,9 % yang menyatakan kondisi politik di Indonesia dalam kondisi baik, sedangkan sangat buruk mencapai 6,8 persen dan 9,0 persen

¹⁵ NSWI (*national single windows for windows for investment*). *Perkembangan realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Triwulan 1 tahun 2002-triwulan 4 tahun 2015*. Diakses di <http://nswi.bkpm.go.id/wps/portai/biumum/lut/p/c/5/04/SB8KLLMSSzPy8xBz9cPO0s3hDAwNPJdDRwN3UIMTAOf-EGOVYD>. Pada tanggal 20 April 2016

¹⁶ Badan Pusat Statistik. *Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara Menurut Negara tempat Tinggal Tahun 2002-2014*. Diakses di <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id1388>. Pada tanggal 20 April 2016

¹⁷ Statistik Kementerian Pariwisata. *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Bulan Januari-Oktober 2015*. Diakses di <http://kemenpar.go.id/userfiles/Labpul%20Oktober%202015klasik%281%29pdf>. Pada tanggal 20 April 2016

masyarakat yang tidak mengetahui kondisi politik Indonesia.¹⁸

2. Letak Geografi dan karakteristik topografi

Indonesia memiliki letak geografis dengan Australia yang berbatasan langsung dengan laut Indonesia di sebelah selatan. Sedangkan dalam karakteristik topografi Indonesia sebagai Negara kepulauan menempatkan penjagaan keamanan terutama dalam wilayah perairan. Keamanan perairan Indonesia merupakan ancaman yang perlu ditangani melalui kerjasama dengan Negara lain. Ancaman kejahatan transnasional berupa penyelundupan orang melalui kawasan perairan Asia Pasifik terutama di Asia Tenggara. Negara Australia merupakan Negara sebelah selatan kawasan Asia Tenggara yang menjadi tujuan dari kejahatan penyelundupan orang.¹⁹

3. Indonesia Sebagai Negara Transit Penyelundupan Orang

Kegiatan penyelundupan orang melibatkan beberapa negara yang dibedakan berdasarkan negara asal (*countries of origin*), negara transit (*countries of transit*) dan negara tujuan (*countries of destination*). Berdasarkan tiga pembagian tersebut, Indonesia termasuk ke dalam negara yang digunakan sebagai tempat transit

¹⁸ Burhanuddin Muhtadi. *LSI: Politik Indonesia Cenderung Memburuk*. Diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/19/17205490/LSI.Politik.Indonesia.Cenderung.Memburuk>. Pada tanggal 20 April 2016

¹⁹ Tim Global Future Institute (GFI). *Pola Ancaman Berpotensi Lemahkan Pertahanan RI di Masa Depan*. Diakses di http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=264&type=1#.VxiI5E-agu0. Pada tanggal 21 April 2016

(*countries of transit*) oleh penyelundupan orang.

4. *Pertimbangan Atribut Nasional*

atribut nasional yang mampu mempengaruhi suatu Negara dalam menentukan kebijakan luar negerinya yaitu : luas Negara, sumber daya alam,geografi, demografi, sistem politik, kapabilitas militer, kapabilitas ekonomi.²⁰

a. *Luas Negara*

Negara Indonesia memiliki luas Negara yang kecil jika dibandingkan dengan Negara Australia, Indonesia memiliki luas wilayah daratan 1.922.570²¹ sedangkan Australia memiliki luas wilayah 7.682.300.²²

b. *Sumber daya alam*

Indonesia memiliki jumlah kekayaan sumber daya alam yang memadai, namun kebijakan pengelolaan sumber daya alam dikatakan tidak maksimal. kebijakan terkait pengolahan sumber daya alam Indonesia yang kurang terbuka terhadap investor asing, masalah korupsi, tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, kurangnya jaminan keamanan investasi, isu tenaga kerja, ketidakpastian regulasi dan hukum. Faktor-faktor tersebut menyebabkan eksplorasi sumber daya alam Negara Indonesia mengalami masalah seperti

dalam sektor eksplorasi pertambangan pada tahun 2011 dimana total eksplorasi di Indonesia hanya \$330 juta dollar sekitar 1,8% dari total anggaran eksplorasi pertambangan global yang mencapai lebih dari \$18 juta.²³ Perbedaanya dengan Negara Australia dimana Negara ini penggunaan sumber daya alam hanya 9 % dari total ekonomi nasional. Walaupun jumlah penggunaan sumber daya alam Australia relatif sedikit tetapi pengelolaan sumber daya alam ekstraktif seperti batu bara,mineral dan gas didukung penuh dengan terbuka terhadap investor asing serta kestabilan penerapan kebijakan dan aturan terkait eksplorasi sumber daya alam.²⁴

c. *Geografi*

Posisi silang letak geografis Indonesia merupakan jalur lalu lintas internasional dan menjadi tempat persinggahan kapal laut yang menempuh pelayaran antara Asia Timur dengan Asia Selatan, Asia Barat dengan Afrika dan

²⁰ Valerie Hudson. *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theori*, Rowman & Littlefield. Bab 6. Hal.145

²¹ Hal ini bisa kita lihat pada data dan informasi geospasial produk Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diakses dari <http://www.bakosurtanal.go.id>. Pada tanggal 12 Januari 2016.

²² Australia –Indonesia Institute, *Geografi Australia*. Diakses dari https://dfat.gov.au/aboutus/publications/people-to-people/geografi_australia/html.

Pada tanggal_ 12 Januari 2016.

²³ Pernyataan Ketua Asosiasi Pertambangan ASEAN yang juga Presiden Direktur PT. Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadiano. *Kebijakan pengelolaan kekayaan alam di Indonesia tidak mendukung*. Diakses di <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kekayaan-alam-karunia-atau-kutukan-bagi-negara/1181901>. Pada tanggal 22 April 2016

²⁴ Pernyataan Mahasiswa Melbourne Bussines School, Mark Crosby. Australia dan Indonesia dianggap telah berhasil dalam mengelola sumber kekayaan alam, hingga bisa membantu pergerakan ekonomi. Tetapi masih banyak hal yang perlu ditinjau ulang untuk mengoptimalkannya. Di Indonesia masalah perundang-undangan soal eksploitasi alam masih menjadi masalah. Diakses di <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kekayaan-alam-karunia-atau-kutukan-bagi-negara/1181901>. Pada tanggal 22 April 2016

Eropa.²⁵ Kapal yang melintasi Indonesia juga menimbulkan dampak terhadap keamanan maritim di sub kawasan Asia Tenggara seperti isu terorisme, perompakan, penggunaan senjata pemusnah massal penyelundupan (orang, narkoba, manusia) yang merupakan kejahatan transnasional dalam kerangka keamanan Indonesia-Australia.²⁶

d. Demografi

Negara Indonesia akan mengalami masa “bonus demografi”²⁷ hal ini merupakan dampak dari adanya perlambatan pertumbuhan jumlah penduduk periode 1971-1980 dari 2,33 persen menjadi 1,44 persen.²⁸ Sehingga pada tahun 2000 ke atas terdapat laju jumlah penduduk Indonesia dalam usia produktif 15-65 tahun lebih besar dari usia tidak produktif.²⁹ Kelebihan tenaga

kerja di Indonesia menjadikan pertimbangan atribut nasional dari konsep demografi, untuk menempatkan tenaga kerja ini ke Australia. Berdasarkan pernyataan sebelumnya Negara Australia telah menyediakan 36.000 lowongan pekerjaan di bidang pariwisata dan perhotelan. Peluang penerimaan tenaga kerja Indonesia juga disebabkan Negara Timur Tengah atau Eropa tidak memiliki kedekatan faktor geografis, sehingga negara Australia menggunakan tenaga kerja Indonesia.³⁰

e. Sistem politik

Sifat keterbukaan sistem politik tidak terletak pada ruang, tetapi ada pada lingkungan tertentu. Sehingga sistem politik terbuka dengan pengaruh lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal.³¹

f. Kapabilitas militer

Kapabilitas militer merupakan kekuatan militer yang dibentuk dan dikembangkan oleh suatu Negara yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional serta kepentingan strategis yang lebih luas di tingkat regional maupun tingkat global. Indonesia menempati nomor 14 diantara 126 Negara lainnya, sedangkan Australia hanya

²⁵ Dadang Sungkawa. *Geografi Regional Indonesia*. Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/195502101980021-DADANG SUNGKAWA/Bahan Ajar GRI/GRI Gabungan Cetak.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/195502101980021-DADANG_SUNGKAWA/Bahan_Ajar_GRI/GRI_Gabungan_Cetak.pdf). Pada tanggal 24 April 2016

²⁶ Pelita. *Kasal Tetap Bertekad Tenggelamkan Kapal, Komandan Seskoal: Lima Isu Keamanan Maritim di Kawasan Asia*. Diakses dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>. Pada tanggal 24 April 2016

²⁷ Niken Paramita Wulandari. *Dapat Bonus Demografi, Indonesia Perlu SDM Cerdas*. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/11/njllgy-dapat-bonus-demografi-indonesia-perlu-sdm-cerdas>. Pada tanggal 24 April 2016

²⁸ BKKBN. *Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia Tahun 2013*. Diakses dari <http://chnrl.org/pelatihan-demografi/Profil-Kependudukan-dan-pembangunan-di-Indonesia-Tahun-2013.pdf>. Pada tanggal 24 April 2016

²⁹ Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2015. *Analisis Bonus Demografi Sebagai Kesempatan Memacu Percepatan Industri di*

Indonesia. Diakses dari <http://bemfebui.com/official/wpcontent/uploads/2015/07/Analisis-Bonus-Demografi-Sebagai-Kesempatan-Memacu-Percepatan-Industri-di-Indonesia.pdf>. Pada tanggal 24 April 2016

³⁰ Pernyataan Dan Steve Ciobo : Australia Sediakan Ribuan Lowongan Kerja Bidang Pariwisata. Diakses dari <http://lifestyle.liputan6.com/read/2463765/australia-sediakan-ribuan-lowongan-kerja-bidang-pariwisata>. Pada tanggal 24 April 2016

³¹ Beddy Irawan Maksudi. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. Hal.4

menempati nomor 23.³² Tetapi Pertimbangan atribut nasional Indonesia dalam konteks kapabilitas militer yaitu Negara Australia merupakan sekutu Amerika Serikat, dimana Negara Amerika Serikat ini telah membuat kebijakan untuk membuat pangkalan militer di Australia dengan penempatan di Kota Darwin.³³

g. *Kapabilitas ekonomi*

Negara Indonesia memiliki kapabilitas perekonomian nasional yang masih rendah. Permasalahan ini diperkuat dengan adanya beberapa pendekatan yang akan dilakukan pemerintah yaitu peningkatan investasi, peningkatan produksi nasional, perbaikan infrastruktur, peningkatan daya saing nasional. Pendekatan-pendekatan tersebut diaplikasikan sebagai percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.³⁴ Sedangkan Australia merupakan salah satu Negara ekonomi terkuat di dunia, hal ini diperkuat dengan struktur ekonomi yang stabil dengan menurunkan rintangan

perdagangan dan investasi dan persaingan nyata yang berlangsung di berbagai bidang, yaitu : ekonomi, keuangan, transportasi udara dan telekomunikasi.³⁵

Politik Luar Negeri Australia

Politik luar negeri Australia terletak pada tujuan dan kepentingan nasional yang akan dicapai. Tujuan Nasional Australia merupakan tujuan dasar dalam politik luar negeri yaitu menjaga integritas dalam lingkungan internasional yang saling bersaing. Integritas suatu bangsa tidak hanya mencakup perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah teritori, sumber daya alam dan manusia dalam batas Negara tetapi juga memelihara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat. Hal-hal tadi disebut sebagai etos fisik dan sosial dari sebuah negara.

Tujuan utama dari politik luar negeri suatu Negara adalah menjaga kelangsungan hidup untuk keamanan Negara. Kepentingan Nasional Australia dalam melihat kepentingan nasional Australia, terdapat empat prioritas pokok.

1. Memelihara keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Berarti Australia memiliki kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan stabil.
2. Mendukung terciptanya keamanan global.
3. Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan.

³² Staff Writer. *Military Power Comparison Result for Indonesia vs Australia*. Diakses dari <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=indonesia&country2=australia&Submit=COMPARE>. Pada tanggal 27 April 2016

³³ Pernyataan Barack Obama yang menyatakan untuk memperkuat kehadiran militer AS di Darwin, dengan 2500 marinir hingga 2017 yang akan ditempatkan wilayah utara Australia. Juga berbagai jet AS, termasuk pembom B-52, yang akan terbang keluar dari pangkalan resmi di Darwin. Diakses dari <https://www.intelijen.co.id/pangkalan-militer-as-di-australia-terkait-kondisi-di-papua/>. Pada tanggal 27 April 2016

³⁴ Jhon Nikita. Presiden. *Pemerintah Terus Tingkatkan Kapabilitas Ekonomi*. Diakses dari <http://www.antaramaluku.com/berita/16158/presiden-pemerintah-terus-tingkatkan-kapabilitas-ekonomi>. Pada tanggal 27 April 2016

³⁵ Tentang Australia: *Ekonomi Global*. Diakses dari http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesia/ekonomi_global.html. Pada tanggal 27 April 2016

4. Menjadi warga dunia yang baik dengan Australia terus memainkan peranan yang positif dan konstruktif diantara aneka ragam isu yang sekarang menjadi subyek diplomasi multilateral, seperti penanganan masalah pengungsi, penyelundupan orang terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia.³⁶

Faktor Eksternal Australia melakukan Kerjasama Dengan Indonesia

1. Kebutuhan keamanan kolektif

Keamanan kolektif merupakan Penggunaan kekuatan dalam sebuah keamanan kolektif untuk mengurangi ketergantungan bantuan mandiri sebagai instrument yang dianggap terlalu mentah dalam penegakan hukum.³⁷ Australia merupakan sekutu dekat Amerika Serikat yang berdampak positif terhadap skema keamanan kolektif sebagai Negara yang paling aman, dimana pada keadaan geografis Australia tidak terjadi ketegangan militer diantara Negara-negara regional Australia.³⁸ Kedekatan Australia dengan Amerika Serikat serta keikutsertaanya dalam invansi Amerika Serikat ke Irak, telah membahayakan keamanan Australia yang telah menjadi sasaran kegiatan terorisme

³⁶ Wawan Darmawan. Arah Politik Luar Negeri Australia Masa Kini. Diakses di http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031-WAWAN_DARMAWAN/arah_politik_australia.pdf. Pada tanggal 17 April 2016.

³⁷ Pieter G Danchin dan Horts Fischer. *United Nations Reform and The New Collective Security*. New York : the United States of America by Cambridge University Press, 2010. Hal. 41

³⁸ Peter Brown. *Australian Influence in South Pacific*. Australian Defence College, 2012. Hal. 4

terutama di kawasan Asia Tenggara.³⁹ Tindakan terorisme yang terjadi merupakan dampak dari kegiatan penyelundupan manusia.⁴⁰

Faktor Internal Australia Melakukan Kerjasama Dengan Indonesia

1. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik Australia

Kondisi sosial Australia yang telah mengalami laju pencari suaka ke wilayah territorial Negara nya, telah mengancam sistem keamanan Australia. Sedangkan dari segi ekonomi Negara Australia telah banyak mengeluarkan dana untuk mengatasi penyelundupan orang sebesar \$654.000.000 pada tahun 2009-2010. Sementara dari segi politik permasalahan pencari suaka ke Australia menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah Australia menjelang pemilihan federasi dimana permasalahan ini menjadi wacana untuk menjadi pemenang dalam pemilihan federasi.

2. Peran pemimpin

Perdana Menteri Jhon Howard yang membuat penolakan kedatangan pencari suaka illegal di Australia. Pemerintah John Howard melakukan peran merespon penolakan isu pengungsi ataupun pencari suaka.

3. Opini Publik

Opini Publik Australia yang disampaikan oleh Stephen Smith (mantan menteri luar negeri dan menteri pertahanan), Profesor Krishna Sen (peneliti

³⁹ Aldo Borgu. *Cost and Benefits of the US Alliance in an Age of Terrorism*. Canberra: Australian

Strategic Policy Institute (ASPI), 2005. Hal. 14

⁴⁰ Barry Buzan. *New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century : International affairs*, Vol. 67, No. 3, 1991. Hal. 433.

politik dan media massa Indonesia) dan Gordon Flake(CEO Perth USAsia) yang menyatakan bahwa :

“Bila hubungan kita tidak bagus dengan Indonesia, maka kelak ketika Indonesia menjadi pasar terbesar keempat di dunia, Australia tidak akan memperoleh keuntungan seperti yang kita punya sekarang”

Australia merupakan sebuah Negara dengan populasi yang sedikit, jika dibandingkan dengan Indonesia yang akan memiliki jumlah penduduk 100 juta orang pada 2050. Australia melihat kondisi ini sebagai peluang untuk kepentingan geopolitik dan perdagangan internasional dalam bentuk ekonomi, perdagangan, sumber daya alam, investasi dan polulasi.⁴¹

4. Australia Sebagai Negara Tujuan Penyelundupan Orang

Penyebab Australia menjadi tujuan penyelundupan orang dapat dijelaskan dengan pengakuan *UN Convention Relating to the Status of Refugees 1951* oleh Australia, konvensi ini memberikan wewenang bagi Australia untuk memberikan status suaka dan status pengungsi. Tetapi sejak di berlakukannya *Securitization of migration* para pencari suaka dipersulit untuk memasuki wilayah Australia, sehingga konsekuensinya para pencari suaka ini menggunakan jasa penyelundupan orang untuk masuk ke wilayah Australia.⁴²

⁴¹Ella Syahputri. *Indonesia Terlalu Penting untuk Australia*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/493860/indonesia-terlalu-penting-untuk-australia>. Pada tanggal 1 Mei 2016

⁴²Fokus. *Melawan Sindikat People Smuggling*. Diakses dari http://lms.aau.ac.id/library/ebook/MJ_3989_12_H

Migrasi ilegal yang menuju Australia dapat telah dinyatakan sebagai kejahatan penyelundupan orang yang biasanya menggunakan jalur laut. Migrasi Ilegal berdampak negatif untuk berkembangnya sindikat penyelundupan orang yang diatur oleh jaringan yang rapi dan terorganisir. Penyelundupan orang juga merupakan dampak negatif dari globalisasi dimana kejahatan ini melanggar hukum positif serta prinsip-prinsip mengenai migrasi.

Pengaturan Penegakan Dibidang Hukum Penyelundupan Orang di Indonesia dan Australia

Berdasarkan hukum positif Indonesia pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan orang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang diatur dalam Pasal 120 ayat(1) dimana terdapat setiap orang yang melakukan penyelundupan orang dipidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,- dan paling banyak Rp.1.500.000.000,-, Pidana yang sama juga dikenakan terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana ini dan diatur dalam Pasal 120 ayat (2). Sementara itu terhadap mereka yang melakukan tindak pidana penyelundupan orang dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya dikenakan ancaman pidana pokok, yaitu lima tahun penjara. Sedangkan untuk tindak pidana penyelundupan orang yang dilakukan oleh korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya

[/files/res/downloads/download_0003.pdf](#). Pada Tanggal 30 Mei 2016

pidana 3 kali lipat (Pasal 136 ayat(2)).⁴³ Hukum yang digunakan Australia dalam menangani penyelundupan orang yaitu *Anti-People Smuggling and Other Measures Act 2010* yang disahkan pada 1 Juni 2010. Undang-Undang ini mengatur tentang pelanggaran hukum bagi seseorang yang memfasilitasi, membawa dan mengusulkan seseorang lain masuk ke Australia, dimana orang yang dibawa tersebut tidak warga Negara Australia dan tidak berhak secara sah datang ke Australia. Undang-Undang ini juga mengawasi pelanggaran bagi warga sipil yang menyembunyikan non warga Australia serta menyediakan dokumen palsu serta memberikan informasi palsu guna melindungi warga non Australia tersebut. Selain itu Undang-Undang ini juga mengakui pelanggaran berat bagi oknum yang melakukan penyelundupan orang dengan menggunakan cara-cara yang berbahaya, menyelundupkan 5 atau banyak orang ke Australia, menyediakan dokumen palsu serta informasi palsu, serta melakukan pelanggaran penyelundupan orang dengan cara menyediakan dukungan sumber daya untuk organisasi penyelundup.⁴⁴

⁴³ Luh Putu Ayu Diah Utami, dkk. *Suatu Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Diakses di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=348844&val=908&title=SUATU%20TINJAUAN%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20TERHADAP%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20PENYELUNDUPAN%20MANUSIA%20%28PEOPLE%20SMUGGLING%29>. Pada tanggal 6 Mei 2016

⁴⁴ Australian Government. *People Smuggling Legislation*. Diakses di <https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/Peoplesmuggling/Pages/Peoplesmugglinglegislation.aspx>. Pada tanggal 8 Mei 2016

Pelaksanaan Kerjasama Penegakan Hukum Indonesia-Australia

1. *Konsultasi dan dialog*
 - a. Kunjungan dalam dialog dukungan pembentukan patroli keamanan maritim terkoordinasi (CORPAT)
 - b. Pelaksanakan *senior official meeting* (SOM) ke 6 di Lombok.
 - c. Dialog antara Polri dengan AFP.
 - d. Konsultasi bilateral Indonesia dengan Australia.
 - e. Pertemuan 2 plus 2 antara Kementerian Luar Negeri RI dengan Menteri Pertahanan Australia.
2. *Kerjasama dalam pembangunan kapasitas penegak hukum.*
 - a. Sumbangan 3 kapal patrol dari Australia untuk Polri.
 - b. Mencegah penyelundupan orang di Indonesia dan Australia melalui operasi resolute
 - c. Bantuan *computer based training* (CBT) dan kantor Satgassus dari Australia ke wilayah Indonesia
3. *Operasi bersama dalam mengintensifkan kerjasama antar kepolisian*
 - a. Operasi bersama antara Polri dengan *australian federal police* (AFP) di Sulawesi Utara.
 - b. Operasi Satgassus Polda Bali dengan Mabes Polri.
 - c. Operasi Satgassus Mabes Polri dengan Polda Jawa Timur.
4. *Kerjasama antar lembaga Indonesia dan Australia*
 - a. Pelatihan keterampilan investigasi untuk para penyelidik penyelundupan orang.

- b. Kerjasama keimigrasian indonesia dengan Australia.
- c. Upaya pencegahan penyelundupan orang melalui kunjungan Menteri Pertahanan Australia ke Departemen Pertahanan Indonesia

II. Simpulan

Lingkungan strategis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan terbuka telah membawa konsekuensi munculnya berbagai permasalahan lintas negara yang disebut sebagai kejahatan transnasional. Kelemahan dari pengaturan wilayah laut Indonesia menjadikan kejahatan penyelundupan orang mudah masuk ke Indonesia dengan menggunakan perahu. Indonesia dalam menyikapi kejahatan penyelundupan orang yaitu sebagai kejahatan yang dapat merusak keadaan dan mempengaruhi kepentingan sosial, ekonomi, politik, agama, sumber daya alam dan persenjataan.

Berdasarkan pernyataan sikap tersebut Indonesia telah menyatakan bahwa membutuhkan Australia yang dinilai sebagai Negara maju tetapi juga sebagai Negara tujuan penyelundupan orang. Menyadari memiliki keasamaan ancaman maka Indonesia dengan Australia melakukan kerjasama penegakan hukum yang berada pada Perjanjian Lombok pada bagian terkait penyelundupan orang.

Referensi

Jurnal

- Agus Subagyo dan Dadang Sobar Wirasuta. 2013. "Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia". Jurnal Pertahanan Vol.3.No.3. Bandung: UNJANI.
- Barry Buzan. 1991. "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century :International affairs". _____ ol.67.No.3.
- Humphrey Wangke. 2012. "Indonesia dan Masalah Imigran Gelap". Info Singkat Hubungan Internasional Vo.IV.No.17. Jakarta: P3DI

Buku

- Borgu, Aldo. 2005. "Cost and Benefits of the US Alliance in an Age of Terrorism". Canberra: Australian Strategic Policy Institute(ASPI).
- Brown, Peter. 2012. "Australian Influence in South Pacific". Australian Defence College.
- Danchin, Pieter G dan Horts Fischer. 2010. "United Nations Reform and The New Collective Security". New York : the United States of America by Cambridge University Press.
- Griffiths, Martin. 2001. "Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Holsti, K.J. 1998. "Politik Internasional ; Kerangka Untuk Analisis". Jakarta: Erlangga.
- Jill Stean, Lloyd. 2009. "Hubungan internasional: Perspektif dan Tema". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maksudi, Beddy Irawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaltout, Mahmud. 2012. *"Laporan Akhir Kompendium Hukum tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum"*. Jakarta: Pengayoman.

Internet

Australian Government. *People Smuggling Legislation*. Diakses di <https://www.ag.gov.au/CrimeAndCorruption/Peoplesmuggling/Pages/Peoplesmugglinglegislation.aspx>. Pada tanggal 8 Mei 2016

Australia –Indonesia Institute, *Geografi Australia*. Diakses dari https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi_australia/html. Pada tanggal 12 Januari 2016

Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diakses dari <http://www.bakosurtanal.go.id>. Pada tanggal 12 Januari 2016.

Badan Pusat Statistik. Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara Menurut Negara tempat tinggal Tahu 2002-2014. Diakses di <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id1388>. Pada tanggal 20 April 2016

Barack Obama. Diakses dari <https://www.intelijen.co.id/pangkalan-militer-as-di-australia-terkait-kondisi-di-papua/>. Pada tanggal 27 April 2016

Burhanuddin Muhtadi. *LSI: Politik Indonesia Cenderung Memburuk*. Diakses di <http://nasional.kompas.com/read/20>

12/02/19/17205490/LSI.Politik.Indonesia.Cenderung.Memburuk. Pada tanggal 20 April 2016

BKKBN. *Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia Tahun 2013*. Diakses dari <http://chnrl.org/pelatihan-demografi/Profil-Kependudukan-dan-Pembangunan-di-Indonesia-Tahun-2013.pdf>. Pada tanggal 24 April 2016

Dadang Sungkawa. *Geografi Regional Indonesia*. Diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/195502101980021-DADANG_SUNGKAWA/Bahan_Ajar_GRI/GRI_Gabungan_Cetak.pdf Pada tanggal 24 April 2016

Dan Steve Ciobo : Australia Sediakan Ribuan Lowongan Kerja Bidang Pariwisata. Diakses dari <http://lifestyle.liputan6.com/read/2463765/australia-sediakan-ribuan-lowongan-kerja-bidang-pariwisata>. Pada tanggal 24 April 2016

Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2015. *Analisis Bonus Demografi Sebagai Kesempatan Memacu Percepatan Industri di Indonesia*. Diakses dari <http://bemfebui.com/official/wp-content/uploads/2015/07/Analisis-Bonus-Demografi-Sebagai-Kesempatan-Memacu-Percepatan-Industri-di-Indonesia.pdf>. Pada tanggal 24 April 2016

Ella Syahputri. *Indonesia Terlalu Penting untuk Australia*. Diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/493860/indonesia-terlalu-penting-untuk-australia>. Pada tanggal 1 Mei 2016

- Fokus. *Melawan Sindikat People Smuggling*. Diakses dari http://lms.aau.ac.id/library/ebook/MJ_3989_12_H/files/res/downloads/download_0003.pdf. Pada Tanggal 30 Mei 2016
- Gustavo Cano. "On Transnationalism" yang merupakan bagian dari Mexico-North Research Network Transnationalism Research Project. Diakses dari www.mexnor.org/programs/TRP/Mexnor%20On%20Trans%20-%20Suggested%20Cit.pdf. Pada tanggal 11 Januari 2016
- Istiqamah Purnomo. *Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia-Indonesia studi kasus: Lombok Treaty*. Diakses dari https://www.academia.edu/12215886/kerjasama_pertahanan_dan_keamanan_australia_indonesia_studi_kasus_lombok. Pada tanggal 11 Januari 2016
- Jhon Nikita. *Presiden Pemerintah Terus Tingkatkan Kapabilitas Ekonomi*. Diakses dari <http://www.antaramaluku.com/berita/16158/presiden-pemerintah-terus-tingkatkan-kapabilitas-ekonomi>. Pada tanggal 27 April 2016
- Luh Putu Ayu Diah Utami.dkk. *Suatu Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Diakses di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=348844&val=908&title=SUATU%20TINJAUAN%20PERTANGGUNGJAWABAN%20PIDANA%20TERHADAP%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20PENYELUNDUPAN%20MANUSIA%20%28PEOPLE%20SMUGGLING%29>. Pada tanggal 6 Mei 2016
- Mark Crosby. Diakses di <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kekayaan-alam-karunia-atau-kutukan-bagi-negara/1181901>. Pada tanggal 22 April 2016
- Martiono Hadiano. *Kebijakan pengelolaan kekayaan alam di Indonesia tidak mendukung*. Diakses di <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kekayaan-alam-karunia-atau-kutukan-bagi-negara/1181901>. Pada tanggal 22 April 2016
- Monica Massari. *Transnational Organized Crime between Myth and Reality: the Italian Case*. 2001. Diakses dari www.essex.ac.uk/ecpr/events/joint_sessions/paperarchive/grenoble/ws8/massari.pdf Pada tanggal 11 Januari 2016 .
- Niken Paramita Wulandari. *Dapat Bonus Demografi, Indonesia Perlu SDM Cerdas*. Diakses dari <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/11/njllgy-dapat-bonus-demografi-indonesia-perlu-sdm-cerdas>. Pada tanggal 24 April 2016
- NSWI (national single windows for windows for investment). *Perkembangan realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara Triwulan 1 tahun 2002-triwulan 4 tahun 2015*. Diakses di http://nswi.bkpm.go.id/wps/portai/bi umum/lut/p/c5/04_SB8KLLMSSzPy8xBz9cPO0s3hDAwNPJdDRwN3UIMTAOf-EGOVYD. Pada tanggal 20 April 2016

Sanchi Davis. *Australia Memperkuat Hubungan Penegakan Hukum dengan Indonesia*. Diakses di http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SMHAJM11_001.html.

Pada tanggal 5 April 2016

Staff Writer. *Military Power Comparison Result for Indonesia vs Australia*. Diakses dari <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=indonesia&country2=australia&Submit=COMPARE>. Pada tanggal 27 April 2016

Statistik Kementerian Pariwisata. *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Pintu Masuk dan Kebangsaan Bulan Januari-Oktober 2015*. Diakses di <http://kemenpar.go.id/userfiles/Labp%20Oktober%202015klasik%281%29pdf>. Pada tanggal 20 April 2016

Tentang Australia. *Ekonomi Global*. Diakses dari http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/ekonomi_global.html. Pada tanggal 27 April 2016

Tim Global Future Institute (GFI). *Pola Ancaman Berpotensi Lemahkan Pertahanan RI di Masa Depan*. Diakses di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=264&type=1#.VxjI5E-agu0. Pada tanggal 21 April 2016

Pelita. *Kasal Tetap Bertekad Tenggelamkan Kapal, Komandan Seskoal: Lima Isu Keamanan aritim di Kawasan Asia*. Diakses dari <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25807>. Pada tanggal 24 April 2016